

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber daya ekonomi lokal yang dimana pendapatan asli daerah itu sendiri berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang di berikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD yang berarti semakin besar kontribusi yang dapat diberikan PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut (Maria sisiliah & Harsono, 2021) Pendapatan asli daerah merupakan sebagai akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil Perusahaan milik daerah, dan pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran Pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

#### A. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Pasal 157 menyatakan sumber pendapatan asli daerah terdiri atas (Wulandari & Iryanie, 2018):

##### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

##### a. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

##### b. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak lain-lain
2. Retribusi Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang di bayar.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di maksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Pada dasarnya jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan (Hutagalung, 2016) yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan, sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atas pemotong retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis – jenis retribusi jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah:

- ) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- ) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- ) Retribusi Tempat Pelelangan
- ) Retribusi Terminal
- ) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- ) Retribusi Tempat Penginapan
- ) Retribusi Rumah Potong Hewan
- ) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- ) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- ) Retribusi Penyebarangan Air

-) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Subjek Retribusi Usaha Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut, menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber – sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi.

Jenis – jenis retribusi tertentu adalah:

-) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

-) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

-) Retribusi Izin Gangguan

-) Retribusi Izin Trayek

-) Retribusi Izin Usaha Perikanan

B. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi dalam (Darmawan, 2021). Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas modal pada Perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas modal pada Perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan dalam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,dan;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pendapatan Asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber

pendapatan baru. Oleh karena itu banyak pemerintah daerah yang bersinergi dengan DPRD guna mencari peluang – peluang baru sebagai sumber pemasukan kas. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Billah & Wijaya, 2022) setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber- sumber potensi penerimaan keuangan daerahnya sendiri. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam Pembangunan ekonomi, pemerintah daerah melalui sistem ekonomi daerah dan asas desentralisasi fiskal dituntut untuk mampu mandiri dalam pembiayaan operasional dalam kebutuhan daerah itu sendiri. Semakin besar dari adanya pendapatan asli daerah yang diterima maka akan semakin besar pula untuk kewenangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan suatu kebijakan.

### **2.1.2. Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 35 menyatakan

bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum per Provinsi, Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menurut (Sulaeman & Silvia, 2019) Dana Alokasi Umum merupakan *general purpose grant* (bantuan umum), yaitu dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke pada Pemerintah Daerah tanpa adanya syarat penggunaan tertentu atas dana tersebut. Menurut (Halim, 2014) DAU bersifat *blok grant* yang diberikan kepada Kabupaten Kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dimana pembagian Dana Alokasi Umum pada tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran yaitu hasil perhitungan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah.

#### A. Fungsi Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15 tentang Dana perimbangan, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian Dana rendah, dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya yang dimiliki. Pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapatkan jumlah Dana Alokasi Umum yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum Diatur berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan dan peraturan

pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal (Halim, 2014 : 127).

#### B. Macam-macam Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum dapat diklasifikasikan berdasarkan penerima, komponen dan fungsinya sebagai berikut:

##### 1. Berdasarkan jenis Pemerintah Daerah Penerima

###### a. Dana Alokasi untuk Provinsi

Dana ini dialokasikan kepada pemerintah provinsi untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, Pendidikan menengah, dan koordinasi Pembangunan antar kabupaten/kota.

b. Dana Alokasi untuk Kabupaten/Kota

Dana ini diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk membiayai pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti Pendidikan dasar, Kesehatan, air bersih, serta Pembangunan infrastruktur lokal.

2. Berdasarkan Komponen Alokasi Dana

a. Komponen Gaji Pegawai (Belanja Wajib)

Bagian ini diperuntukkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah pusat mengalokasikan sebagian besar Dana Alokasi Umum untuk menjamin kemampuan daerah dalam membayar kewajiban rutin tersebut.

b. Komponen Celah Fiskal (Belanja Umum)

Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal suatu daerah. Bagian ini dihitung berdasarkan indikator-indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, dan tingkat kemiskinan. Dana inilah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umum daerah.

3. Berdasarkan Fungsi Penggunaannya (secara fungsional)

a. Belanja Pegawai

Meliputi pembayaran gaji pokok, tunjangan, dan iuran pensiun bagi ASN daerah.

b. Belanja Operasional Pemerintah

Digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintahan seperti pembelian alat tulis kantor, Listrik, air, telekomunikasi, dan operasional dinas.

c. Pelayanan Publik Dasar

Termasuk pendanaan untuk sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan fasilitas umum lainnya.

d. Pemeliharaan Aset dan infrastruktur

Dibelanjakan untuk perawatan dan pemeliharaan jalan daerah, gedung sekolah, puskesmas, dan kendaraan operasional.

C. Faktor-faktor Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi diantaranya yaitu:

1. Alokasi Dasar

Alokasi dasar ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar untuk menjalankan pemerintah di daerah. Ini mencakup biaya rutin pemerintah dan gaji pegawai daerah.

2. Jumlah Penduduk

Faktor jumlah penduduk mempengaruhi DAU karena semakin banyak penduduk di suatu daerah, maka semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik seperti Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur.

3. Luas Wilayah

Besaran wilayah mempengaruhi DAU karena daerah dengan wilayah yang lebih luas umumnya memerlukan anggaran yang lebih besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur serta memberikan pelayanan publik yang merata.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi faktor penting karena menandakan tingkat kemandirian fiskal disuatu daerah. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah akan menerima dana alokasi umum yang lebih besar untuk mendukung kebutuhan anggaran mereka.

#### 5. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil

Pengalokasian dana ini memperhitungkan jumlah Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil yang diterima oleh daerah. Daerah yang menerima lebih sedikit dari kedua dana ini akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang lebih besar untuk menutupi kekurangan tersebut.

#### D. Pengukuran DAU

Menurut (Ridwan & Nawir, 2021) pengukuran Dana Alokasi Umum melibatkan penetapan dan alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan publik. Dalam hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode pengukuran ini mencakup penetapan kriteria alokasi berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, serta analisis efektivitas penggunaan dana.

#### **2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2016) Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan insfrastruktur, penambahan

jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya. Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yang harus di perhatikan yaitu distribusi pendapatan. Proses pertumbuhan ekonomi ini ditunjukkan untuk meningkatkan output perkapita dalam jangka Panjang. Produksi perkapita mencakup tiga aspek penting: proses, produksi perkapita, dan perencanaan jagka Panjang yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak hanya mewakili output namun juga focus pada peningkatan tingakt kesejahteraan per individu dalam masyarakat.

#### A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan upaya peningkatan kapasitas kapasitas produktif dengan tujuan meningkatkan output yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut (Kurniawan, 2018) Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota selama periode tertentu yang biasanya satu tahun.

PDRB juga berfungsi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, peningkatan PDRB biasanya berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup.

Namun pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga beresiko menyebabkan inflasi jika tidak di kelola dengan baik.

#### B. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2016) ada beberapa faktor yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

##### 1. Tanah dan kekayaan Alam

Sumber daya alam seperti tanah, mineral, dan sumber daya lainnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya ini dapat menjadi basis untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, pertambangan, dan industri.

##### 2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan potensi pasar yang luas serta tenaga kerja yang tersedia untuk berbagai sektor ekonomi dan mutu atau kualitas tenaga kerja termasuk tingkat Pendidikan, keterampilan, dan Kesehatan juga sangat penting. tenaga kerja yang terampil dan terdidik dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

##### 3. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Ketersediaan dan keragaman barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Produksi barang yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar dapat mendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja sedangkan inovasi teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan

produktivitas. Teknologi yang lebih maju memungkinkan proses produksi yang lebih maju memungkinkan proses produksi yang lebih cepat, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas produk. Negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru dapat lebih bersaing di pasar global, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Struktur sosial dan institusi yang ada dalam masyarakat termasuk sistem Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sistem sosial yang mendukung akses Pendidikan dan pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Dan sikap masyarakat terhadap kerja, inovasi, dan perubahan juga sangat berpengaruh. Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap Pendidikan, kewirausahaan, dan kerja keras cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap perubahan atau inovasi dapat menghambat kemajuan ekonomi.

#### C. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut (Sukirno, 2016) yaitu sebagai berikut :

##### 1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan klasik yang dikembangkan oleh ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang.

Beberapa aspek utama pada teori pertumbuhan klasik:

- a. Faktor produksi
- b. Skala ekonomi
- c. Produktivitas
- d. Hukum penerunan hasil (law of diminishing return)
- e. Perdagangan dan spesialisasi

Teori pertumbuhan klasik menekankan pentingnya peran faktor produksi, inovasi, dan pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak dari konsep-konsep ini masih relevan, teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh para ekonom modern dengan memasukkan faktor-faktor baru seperti teknologi informasi dan perubahan sosial.

## 2. Teori Schumpeter

Teori Pertumbuhan Ekonomi Austria Joseph Schumpeter sangat berpengaruh dan berfokus pada inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Berikut beberapa point penting dari teori ini:

1. Inovasi
2. Kreatif destruction
3. Peran pengusaha
4. Siklus Ekonomi
5. Modal dan Pembiayaan
6. Teori pertumbuhan endogen

Teori Schumpeter menekankan pentingnya inovasi dan dinamika pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengakui peran penting wirausaha dan proses penghancuran kreatif, teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana perekonomian dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan.

### 3. Teori Harrod-Domar

Teori harrod-domar merupakan model ekonomi yang menjelaskan hubungan antara investasi, Tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Teori yang diperkenalkan oleh ekonom Sir Roy harrod dan F.C Domar ini berfokus pada pentingnya investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Berikut beberapa point penting dalam teori ini :

1. Dasar teori
2. Hubungan antara investasi dan pertumbuhan
3. Peran Tabungan
4. Koefisien modal-output
5. Keseimbangan dinamis
6. Implikasi kebijakan

Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi dan tabungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun model ini memiliki keterbatasan, seperti tidak memperhitungkan faktor eksternal, model ini memberikan dasar yang berguna untuk memahami hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi.

#### 4. Teori pertumbuhan neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh ekonom seperti Robert Solow dan Trevor Swan memberikan kerangka untuk memahami pertumbuhan ekonomi jangka Panjang dengan menekankan peran modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Berikut beberapa point penting dalam teori ini :

1. Faktor produksi
2. Fungsi produksi
3. Konsep hasil yang menurun
4. Peran teknologi
5. Keseimbangan jangka Panjang
6. Konvergensi
7. Kritik dan pengembangan

Teori pertumbuhan neoklasi menekankan peran modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Meskipun terdapat keterbatasan dalam teori ini, teori ini memberikan landasan penting untuk memahami pendorong pertumbuhan ekonomi dan peran inovasi dalam penciptaan kekayaan. Teori ini menekankan peran modal, tenaga kerja, dan teknologi.

#### **2.1.4. Teori Hubungan**

##### **2.1.4.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menghubungkan Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terutama memiliki tiga alasan yaitu: efisiensi dalam alokasi sumber daya untuk menyediakan

barang publik, kebijakan pemerintah yang meningkatkan pendapatan perkapita, dan pertumbuhan perkapita lebih mudah diukur dan ditafsirkan dari pada indikator kinerja ekonomi.

Menurut (Sulaeman & Silvia, 2019), dalam Teori Fiscal Federalism menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat dicapai melalui adanya desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oates (1972) mengatakan pendapat bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya, sehingga efisiensi tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah dan nasional.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang ada didalam APBN, dimana dana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk anggaran belanja daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Semakin tinggi belanja pemerintah dalam pembelian barang atau jasa maka akan berimplikasi pada kenaikan PDRB.

#### **2.1.4.2. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari Dana Perimbangan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana Alokasi Umum bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai

dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut (Mokoginta et al., 2023) dalam teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Solow (1956), Pertumbuhan Ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam pembahasan ini, Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk membiayai Pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat meningkatkan produktivitas dan output ekonomi daerah. Sementara itu menurut teori Keynesian menekankan peran belanja pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Dana Alokasi Umum sebagai sumber belanja pemerintah daerah dapat memberikan efek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka pendek.

Dengan demikian, kedua teori ini mendukung bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum yang digunakan secara produktif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah baik dalam jangka pendek maupun panjang.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

*Tabel 2. 1*

### Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Haris Mutasim Billah & Riko Setya Wijaya	Pengaruh PAD,DAU,Inflasi, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2020, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1, Nomor 8, 2022	Variabel yang diteliti: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Inflasi, Investas, Pertumbuhan Ekonomi. Alat analisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukan diketahui bahwa secara simultan variabel PAD,DAU,Inflasi, dan investasi memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di sidoharjo.	Menggunakan variabel yang sama	Menggunakan alat analisis yang berbeda, Objek Penelitian, Tahun Peneltian

2.	Maria Sisilia & Harsono	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019, Jurnal Journal of Regional Economics Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021	Variabel yang diteliti: Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan PAD, DAK dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Malam tahun 2010-2019.	Menggunakan variabel yang sama yaitu Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan alat analisis yang sama yaitu regresi linier berganda.	Tahun penelitian, Objek Penelitian
3.	Kartini katrina mamuka,dkk	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 19, Nomor 03, Tahun 2019	Variabel yang diteliti: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Alat Analisis menggunakan Regresi Linier Berganda, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sedangkan DAU berpengaruh	Menggunakan variabel yang sama	menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu metode regresi data panel, Tahun penelitian, objek penelitian

			positif dan signifikan terhadap PDRB		
4.	Rani Wulantari & Meidy Haviz	Pengaruh PAD, DAU, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat 2003-2017, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021	Variabel yang diteliti: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB, Alat analisis menggunakan Metode Ordinary Least Square, Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan PMDN berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PDRB	Menggunakan variabel yang sama	Tahun penelitian, Objek Penelitian, Alat Analisis
5.	Syafida Miftakhul Alifah & Lintang Kurniawati	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Economics and Digital Business Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2024	Variabel yang diteliti: Pendapatan Daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, perpajakan daerah, dan belanja modal, Pertumbuhan ekonomi, menggunakan alat analisis berganda, Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,	Menggunakan variabel yang sama yaitu dana alokasi umum, belanja modal, pertumbuhan ekonomi	Menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu analisis regresi, tahun penelitian, objek penelitian

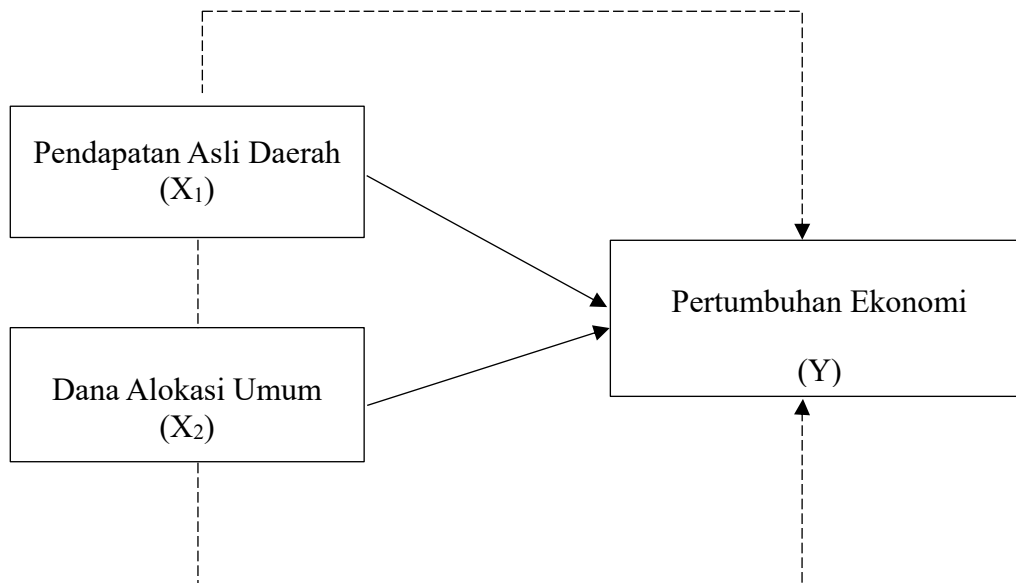
			namun pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh.		
6.	Muhammad Puji Prawiroyudo & Saring Suhendro	Pengaruh Perutmbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Indonesia Tahun 2028-2021), Jurnal: Management Studies and Entrepreneurship Journal, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2023	Variabel yang diteliti: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, alat analisis menggunakan metode SPSS 26, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal	Menggunakan variabel yang sama yaitu dana alokasi umum, belanja modal, pertumbuhan ekonomi	Menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu metode SPSS 26, tahun penelitian, objek penelitian
7.	Andy Mokoginta,dkk	Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah,	Variabel yang diteliti: Pertumbuhan Ekonomi, Belanj Modal, Ddana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,dan Dana Alokasi Khusus, alat analisis regresi berganda, hasil penelitian secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif	Menggunakan Variabel yang sama Dana Alokasi Umum,Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, menggunakan	Tahun Peneltian, objek Penelitian

		Volume 24, Nomor 3, Tahun 2023	signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	alat analisis yang sama yaitu analisis regresi berganda	
8.	Jefri Alfin Sinaga, dkk	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020	Variabel yang diteliti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Otonomi Daerah, alat analisis, hasil penelitian menunjukkan dana alokasi khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun dan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Menggunakan Variabel yang sama Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi	Tahun penelitian, Objek Penelitian
9.	Jesika Lulage, dkk	Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten kepulauan Talaud, Volume 23, Nomor 6, Tahun 2023	Variabel yang diteliti: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, metode analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan	Menggunakan Variabel yang sama yaitu dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan	objek penelitian, tahun penelitian

			terhadap pertumbuhan ekonomi.	alat analisis yang sama	
10.	Metta Maheni & Maryono	Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening, Proceeding sendiu, Tahun 2021	Variabel yang diteliti: PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, SPSS, hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa dau secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomoni.	Menggunakan Variabel yang sama	Tahun peneltian, Objek Penelitian, Alat Analisi

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variable independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) dan satu variable dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Adapun Kerangka Pemikiran dapat digambarkan hubungan variable independent dan dependen sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**

### Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— = Hubungan secara parsial

----- = Hubungan secara simultan

### 2.4. Uji Hipotesis

Menurut teori (Suci Haryanti, M.P.d., 2008) hipotesis merupakan pernyataan yang dapat diuji dan diukur, yang dirumuskan untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara variabel. Dalam penelitian, hipotesis berfungsi sebagai asumsi yang diuji untuk menentukan kebenaran. Dari penjelasan tersebut maka dapat diperoleh hipotesis dalam

penelitian ini yaitu diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara parsial maupun simultan.